

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 14
Jenis Rapat : Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 11 September 2019
Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III)
Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara : Pembahasan Anggaran RAPBN 2020
Ketua Rapat : **Dr. H. Zainudin Amali, M.Si/ Ketua Komisi II DPR RI.**
Sekretaris Rapat : Danis Maya, SH / Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir : A. 23 dari 48 Anggota Komisi II DPR RI
B. Menteri Agraria Tata Ruang /Kepala BPN RI
C. Ketua KPU RI
D. Ketua Bawaslu RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria Tata Ruang /Kepala BPN RI, Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI agenda Pembahasan Anggaran RAPBN 2020, pada Rabu, 11 September 2019, dibuka pada pukul 11.15 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Zainudin Amali, SE, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

A. Kesimpulan dengan Menteri Agraria Tata Ruang /Kepala BPN RI

1. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN Tahun 2020 sebesar **Rp10.096.979.235.000,- (sepuluh trilyun sembilan puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**, untuk

ditetapkan sebagai Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kementerian ATR/BPN Tahun 2020, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya :Rp4.463.251.865.000,-
 - b. Program Peningkatan Sarana & Prasarana : Rp248.312.674.000,-
 - c. Program Pengawasan & Peningkatan Akuntabilitas Aparatur : Rp25.106.400.000,-
 - d. Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang : Rp230.374.057.000,-
 - e. Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan : Rp323.481.460.000,-
 - f. Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan : Rp34.179.938.000,-
 - g. Program Penataan Agraria : Rp23.611.405.000,-
 - h. Program Pengadaan Tanah : Rp16.697.579.000,-
 - i. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah : Rp184.037.986.000,-
 - j. Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang : Rp20.319.200.000,-
 - k. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah :Rp4.527.606.671.000,-
2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian ATR/BPN sebesar **Rp4.129.123.880.000,- (empat trilyun seratus dua puluh sembilan milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)**, dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kementerian ATR/BPN tahun 2020, melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
 3. Kementerian ATR/BPN akan menindaklanjuti terkait penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus Moara di Jakarta untuk diusulkan menjadi anggaran tambahan baru yang akan dibahas dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

B. Kesimpulan dengan KPU RI dan Bawaslu RI

1. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2020 sebesar **Rp2.159.511.595.000,- (dua trilyun seratus lima puluh sembilan milyar lima ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** untuk ditetapkan sebagai Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) KPU Tahun 2020, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya :Rp2.078.104.195.00
 - b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik :Rp81.407.400.000,-
2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh KPU sebesar **Rp1.034.738.105.000,- (satu trilyun tiga puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah)**, dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) KPU tahun 2020 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
 3. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tahun 2020 sebesar **Rp2.963.762.603.000,- (dua trilyun sembilan ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga ribu rupiah)**, termasuk didalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp10.720.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), untuk ditetapkan sebagai Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Bawaslu Tahun 2020, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
 - a. Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya :Rp184.075.278.000,-
 - b. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu :Rp2.779.687.325.000,-
 4. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Bawaslu sebesar **Rp349.920.650.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**, dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Bawaslu tahun 2020 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.50 WIB.

Jakarta, 11 September 2019
KETUA RAPAT

Dr. H. ZAINUDIN AMALI, M.SI
A-292

